

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat

Farel Pratama Putra<sup>1\*</sup>, Ali Anis<sup>2</sup>, Ariusni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: [fp39638@gmail.com](mailto:fp39638@gmail.com)

### Info Artikel

#### Diterima:

20 Januari 2022

#### Disetujui:

28 Februari 2022

#### Terbit daring:

1 Maret 2022

### Sitasi:

Putra, F, Pratama & Anis, A (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat. JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan, 4(1),

### Abstract

*This Study aims to see (1) the effect of economic growth on poverty in West Sumatera (2) the effect of the human development index on poverty in West Sumatera (3) the effect of government policies on poverty in West Sumatera . This type of research is descriptive and associative. The data used in this study is secondary data from West Sumatera in the form of panel data from 2015 to 2019 and data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of West Sumatera. This type of research is descriptive and associative. The data used in this study is Indonesian secondary data in the form of panel data from 2010 to 2019 and this data was obtained from the official institutions of the Ministry of Finance and the Central Statistics Agency. The method used is panel analysis of regression data which is processed using Eviews. The results showed that economic growth had a positive and significant effect on poverty in West Sumatera Regency/City with, the Human Development Index had a negative and significant effect on Poverty in West Sumatera Regency/City with a, Government Policy (BANSOS PIP) has a negative and insignificant effect on poverty in the Regency/City of West Sumatera.*

**Keywords:** *Economic Growth, Human Development Index (HDI), Government Policy, Poverty*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat (1) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Sumatera Barat (2) pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Sumatera Barat (3) pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Sumatera Barat . Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Sumatera Barat dalam bentuk data panel dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan data ini di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat . Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Indonesia dalam bentuk data panel dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan data ini diperoleh dari Lembaga resmi Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Metode yang digunakan analisis regresi data panel yang di olah dengan menggunakan Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat, kebijakan Pemerintah (BANSOS PIP) berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

**Kata Kunci :** *Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kebijakan Pemerintah, Kemiskinan*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah satu keanehan yang terjadi selama ini di Indonesia, kemelaratan di Indonesia sampai saat ini tidak mempunyai prosedur yang solid dari otoritas publik mencegah kemiskinan terjadi bagi individu Indonesia yang berhadapan pada orang miskin. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk. Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Banyaknya jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap berbagai masalah sosial maupun ekonomi negara, diantaranya yaitu tingkat kemiskinan. Kemiskinan yaitu ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu wilayah atau daerah.

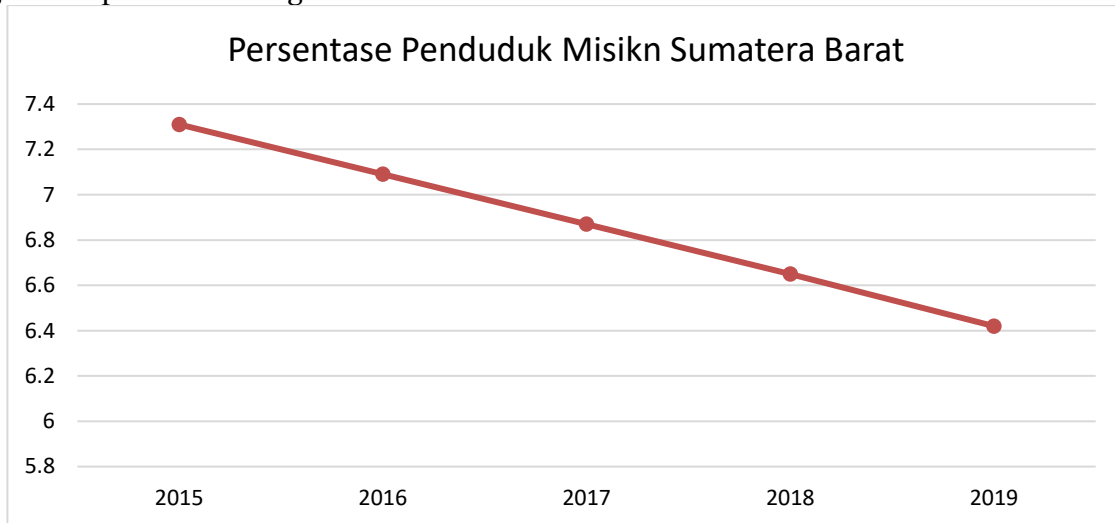
Ada tiga alasan untuk pengembangan kemiskinan menurut perspektif ekonomi, yang pertama karena contoh kepemilikan aset yang tidak konsisten yang menghasilkan penyebaran pembayaran yang tidak konsisten. Kedua, kemiskinan muncul karena kontras dalam SDM, sifat SDM yang efisiensinya rendah pada tingkat yang rendah. Ketiga, pemikiran muncul dari kontras dalam masuk ke kepemilikan modal. Di mana tiga alasan kemiskinan mengarah pada hipotesis lingkaran kebutuhan tak berujung (*vicious cycle poverty*). (Agustina et al., 2019). Pembangunan ekonomi dan kemiskinan merupakan petunjuk penting bagi tercapainya pergantian peristiwa suatu bangsa., yang telah mencapai perkembangan finansial juga dibarengi dengan maraknya persoalan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan . (Jonaidi, 2012)

Dengan pertumbuhan ekonomi berkembang setiap tahun, dapat dikatakan bahwa kemajuan berkembang. Sesuai analisis pasar, Arsyad (2004), pertumbuhan ekonomi dicirikan sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto, apakah peningkatan tersebut lebih menonjol atau tidak persis dengan laju perkembangan penduduk, atau terjadi atau tidaknya perubahan dalam konstruksi moneter. Spekulasi (modal), kemelaratan dan pembangunan keuangan saling terkait. Sulit bagi otoritas publik untuk membuat posisi baru tanpa perkembangan moneter yang tinggi. Sama sulitnya untuk membuka pintu bisnis bagi orang miskin (jaringan lingkungan) dengan asumsi pembangunan keuangan hanya ditopang oleh latihan penciptaan dan membutuhkan tenaga kerja pendidikan lanjutan. Dimana sebagian besar masyarakat miskin berada di luar pendidikan dasar (SD) atau belum menyelesaikan sekolah dasar.

Pembangunan ekonomi dan kemiskinan merupakan petunjuk penting bagi tercapainya pergantian peristiwa suatu bangsa. Setiap negara akan berusaha untuk mencapai pembangunan ekonomi yang ideal dan mengurangi kebutuhan. Di banyak negara di planet ini, kondisi utama untuk penurunan kemiskinan adalah pembangunan keuangan. Namun, kondisi di Negara-negara non-industri, termasuk Indonesia , yang telah mencapai perkembangan finansial juga dibarengi dengan maraknya persoalan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan . (Jonaidi, 2012)

Indeks pembangunan manusia, yang merupakan gambaran tingkat kualitas manusia, berperan penting dalam mengurangi peningkatan. Perbedaan pada kesempatan untuk berubah menjadi individu yang utuh, baik secara intelektual, tulus, dan logis, merupakan modal penting bagi suatu negara untuk keluar dari kemiskinan. IPM yang merupakan alat penaksir sifat pergantian peristiwa manusia, merupakan variabel penting bagi suatu bangsa dalam mengurangi kebutuhan juga berpengaruh buruk terhadap tingkat kemiskinan sehingga tingkat kebutuhan akan semakin tinggi, hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa IPM mencerminkan sifat tingkat pergantian manusia Indonesia. Tingkat human improvement list yang merupakan batasan untuk menata negara yang berevolusi, mencipta, atau belum matang, merupakan salah satu elemen penyebab kemiskinan di Indonesia. (Pratama, 2015)

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting bagi perekonomian lokal atau nasional. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, dan pemerintah khususnya harus segera menemukan jalan keluar dalam upaya mereka untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung proses di pemerintah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Upaya Sumatera Barat mengentaskan kemiskinan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dibuktikan dengan tren penurunan tingkat kemiskinan.



Adanya pengentasan kemiskinan di daerah menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan berhasil. Ketika ekonomi berkembang di suatu wilayah (negara atau wilayah kecil tertentu), itu meningkatkan pendapatan yang harus dibelanjakan, dan ketika didistribusikan dengan benar di antara penduduk lokal, kemiskinan dapat dikurangi. Oleh sebab itu, berbagai teori, pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan. (Kuncoro, 2004).

Menurut teori Todaro (2011) Jika tingkat pendapatan Anda kurang dari \$1,25 per hari, Anda dianggap benar-benar miskin. Pendapatan orang-orang di bawah garis ini tidak memenuhi kebutuhan gizi minimum atau sebagian dari pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup termasuk makanan, pakaian, kesejahteraan, penginapan dan instruksi penting untuk hidup dan bekerja. Ini cukup untuk memenuhi persyaratan dasar untuk memutuskan tingkat upah yang memenuhi persyaratan sebenarnya untuk makanan, pakaian dan tempat berlindung untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan langsung dan relatif, ada gagasan tentang kemelaratan yang mendasari, sosial, dan situasional.

Beberapa dasar kebutuhan ada 3 indikator yang digunakan dalam mengukur kemiskinan, khususnya (1) Catatan Jumlah Kepala, (2) daftar kedalaman kebutuhan (Destituti Hole File). (3) Catatan keseriusan kebutuhan (Destitution Seriousness File). File Headcount digunakan untuk menghitung kebutuhan langsung yang terdiri dari dua bagian, yaitu garis kebutuhan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan BPS sebagai alasan untuk menyusun daftar jumlah pegawai teratasi dengan mempertimbangkan batas penggunaan dasar untuk penggunaan makanan yang sebanding dengan 2.100 kalori setiap hari dan penggunaan non-makanan. (Yacoub, 2012).

Menurut teori Todaro (2011) menjelaskan seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya berada di bawah \$ 1,25 perhari. Pendapatan orang-orang yang berada di bawah garis tidak akan memenuhi kebutuhan nutrisi minimum atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Selain kemiskinan absolut, dan relatif terdapat juga konsep

kemiskinan struktural, kultural, dan situasional. Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang perhari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya .

Menurut Kuznet dalam Tambunan, (2011) Pertumbuhan ekonomi ekonomi kuat dengan kemiskinan, dengan pertumbuhan ekonomi cenderung menaikkan tingkat kemiskinan pada tahap awal, tetapi tingkat kemiskinan terus menurun saat mendekati tahap akhir. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak buruk terhadap kemiskinan. Menurut (Siregar, 2011) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan yang ampuh dalam mengurangi kekurangan. Ini menyiratkan bahwa pembangunan ini harus menyebar ke setiap kelompok gaji, termasuk orang miskin (pembangunan dengan nilai). Secara langsung, ini menyiratkan bahwa pembangunan harus dijamin di daerah-daerah di mana pekerjaan yang tidak berdaya (agribisnis atau area serius bekerja). Secara tidak langsung, diperlukan kerja pemerintah yang benar-benar kuat untuk merealokasi keuntungan pembangunan yang bisa diperoleh dari bidang-bidang saat ini seperti administrasi dan perakitan.

Menurut Harrord Domar adalah salah satu spekulasi perkembangan ekonomi yang mutakhir, hipotesis ini sangat penting untuk membuat usaha untuk pengembangan moneter. Semakin tinggi spekulasi untuk pengembangan keuangan, semakin baik ekonomi, usaha mempengaruhi total bunga serta total saham melalui dampaknya pada batas penciptaan. Dalam pandangan yang lebih bertele-tele, spekulasi akan memperluas persediaan modal.

Salah satu metodologi/upaya untuk memusnahkan kemelaratan adalah peningkatan (SDM). Peningkatan aset manusia harus dimungkinkan dengan lebih mengembangkan akses ke pemanfaatan administrasi sosial (pengajaran, kesejahteraan dan rezeki) yang merupakan sistem otoritas publik untuk mengurangi dan membangun bantuan pemerintah. Peningkatan manusia dapat diperkirakan dengan Human Advancement List (HDI) atau Human Improvement Record (HDI), yang merupakan daftar gabungan untuk mengukur sifat pergantian peristiwa manusia. IPM menggambarkan file kemajuan manusia sejauh pembangunan, nilai, dan pemerataan di bidang kesejahteraan, pelatihan, dan bantuan pemerintah daerah. Rendahnya IPM akan menyebabkan rendahnya daya guna kerja penduduk. Efisiensi yang rendah menghasilkan upah yang rendah, sehingga meningkatkan jumlah orang miskin. Untuk situasi ini, kemajuan manusia diperkirakan dengan Human Improvement File (HDI) atau Human Improvement List (HDI), yang merupakan daftar gabungan untuk mengukur pencapaian.(UNDP,1997).

Teori pertumbuhan baru, pentingnya pekerjaan otoritas publik, khususnya dalam mengerjakan sifat SDM dan memperluas pekerjaan inovatif untuk bekerja pada kualitas manusia dan kapasitas untuk membunuh kemiskinan bergantung pada sifat. SDM yang berkualitas akan memperluas kemampuan, otoritas inovasi dan kebermanfaatannya penduduk. Pengembangan kemampuan dan efisiensi lebih lanjut akan membangun nilai penawaran dan kapasitas penduduk untuk memperoleh pekerjaan di dunia bisnis atau membuka organisasi mereka sendiri sehingga gaji akan meningkat dan akan mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pengembangan SDM yang berkualitas terus dilakukan untuk mengurangi kebutuhan.Rasidin K & Bonar, (2004), Hal utama adalah sifat SDM adalah peningkatan dalam pengajaran dan kesejahteraan telah memperluas sifat SDM. Untuk orang miskin, sumber daya pendidikan dan kesejahteraan akan membantu memperluas kegunaannya, dengan cara ini meningkatkan pendapatan mereka.

Klasen, (2005) Menyatakan bahwa kebijakan pemerintah adalah salah satu instrumen kebutuhan. Kontes dikenali memiliki konsekuensi langsung dan menyimpang untuk pendidikan, kesehatan, kerangka kerja, inovasi, akomodasi, sumbangan, dan gerakan. Dampak negatif dari pengeluaran pemerintah terhadap kemelaratan yaitu negatif dan besar. Jika dilihat dari konsekuensi peninjauan, terlihat bahwa dampak langsung pada otoritas

publik pada kebutuhan lebih menonjol daripada dampak menyimpang. pada kebutuhan. Dampak cepat muncul sebagai keuntungan yang didapat dari tantangan pekerjaan dan program bantuan pemerintah. Dampak menyimpang muncul ketika kepentingan dalam fondasi negara, pemeriksaan, kesejahteraan dan pelatihan jaringan pedesaan, pengembangan agribisnis dan non-agraria mengarah ke posisi yang lebih menonjol dan membayar orang miskin dan bahan pokok yang lebih murah.

Menurut Kusriyah. S, (2019) Hingga saat ini, undang-undang tentang bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin masih berupa pecahan luas dengan tujuan akhir untuk menggarap bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin secara tertata, terarah, dan terpelihara. Sasaran dari bantuan sosial tersebut adalah pelanggaran kebutuhan, pemulihan sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, pensiun yang didukung pemerintah dan bencana para eksekutif. Alasan bantuan sosial direncanakan untuk memberikan uang atau produk kepada keluarga tidak berdaya dengan tujuan agar mereka dapat mengerjakan bantuan pemerintah dari individu yang dipesan sebagai keluarga tidak berdaya. Bantuan diberikan secara khusus dan pemanfaatan rencana pengeluarannya jelas.(Alba & Kurniawan, 2019).

Pedoman Pendeta Uang (PMK) nomor 181 tahun 2012, bansos adalah penggunaan uang tunai, barang dagangan, atau administrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah untuk melindungi daerah dari kemungkinan bahaya sosial, peningkatan moneter batas, dan bantuan pemerintah daerah setempat. Bantuan sosial adalah program fleksibilitas moneter untuk keluarga yang tidak berdaya meskipun ada kejutan dalam hal makanan, kesejahteraan, instruksi, serta keadaan darurat keuangan dan peristiwa bencana. Ini berarti bahwa bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga sebagai program jaminan jaminan dengan tujuan akhir untuk membatasi kelemahan keuangan keluarga yang tidak berdaya.(Terhadap et al., 2018).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif asosiatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran uraian mengenai variabel-variabel yang sedang di teliti. Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat adanya pengaruh fariabel bebas terhadap Variabel terikat Dilihat dari sebuah penlitian ini menggunakan data panel 19 Kab/Kota di Sumatera Barat digunakan, dari Tahun 2015-2019 kemudinan Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan EvIEWS9. Variabel yang dipakai yakni Pertumbuhan Ekonomi yang di ukur berdasarkan laju PDRB dinyatakan dalam satuan persen ( $X_1$ ), Indeks Pembangunan Manusia IPM dapat di ukur dalam satuan kriteria indeks pertahun apabila IPM rendah  $< 50$  sedangkan IPM tinggi  $> 80$  ( $X_2$ ), Kebijakan Pemerintah ukur dari total persentase masyarakat penerima bantuan program Indonesia pintar (PIP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%). ( $X_3$ ) dan Kemiskinan indikator yang di pakai persentase kemiskinan dan datanya di nyatakan dalam satuan persen (%) ( $Y$ ).

Penelitian ini menggunakan anlisis regresi data panel, yaitu penggabungan cross section dan time series. Data cross section adalah data observasi pada beberapsa subjek penelitian dalam satu waktu. Sedangkan data time series adalah data observasi pada satu subjek penelitian diamati dalam satu periode waktu

Formulasi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_i \quad (1)$$

Dimana  $Y_{it}$  adalah kemiskinan,  $X_{1it}$  adalah pertumbuhan ekonomi,  $X_{2it}$  adalah indeks pembangunan manusia,  $X_{3it}$  adalah kebijakan pemerintah,  $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$  adalah elastisitas variabel bebas dan  $i$  adalah *cross section*,  $t$  adalah *time series* dan  $U_{it}$  adalah *error term*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji *lagrange multiplier* maka penelitian ini menggunakan *Random Effect Model*. Apabila model regresi panel berbentuk *Random Effect* maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan. Namun, jika model regresi panel berbentuk *Common Effect* atau *Fixed Effect* maka perlu dilakukan uji asumsi klasik.

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat pada bentuk gabungan data runtun waktu dan tempat. Dari hasil penelitian dapat ditentukan Pengaruh pertumbuhan ekonomi (X1) Indeks Pembangunan Manusia (X2) kebijakan Pemerintah (X3) terhadap Kemiskinan (Y). Estimasi regresi panel dengan pendekatan *Random Effect Model* di peroleh hasil sebagai berikut .

### Hasil Output Random Effect Model (REM) Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kebijakan Pemerintah

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 08/28/21 Time: 13:12				
Sample: 2015 2019				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 19				
Total panel (balanced) observations: 95				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.23469	2.722078	10.00511	0.0000
X1	0.279896	0.080935	3.458266	0.0008
X2	-0.307500	0.034251	-8.977776	0.0000
X3	-0.001307	0.000839	-1.558159	0.1227
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.878045	0.9830
Idiosyncratic random			0.247130	0.0170
Weighted Statistics				
R-squared	0.652050	Mean dependent var	0.400683	
Adjusted R-squared	0.640579	S.D. dependent var	0.407148	
S.E. of regression	0.244092	Sum squared resid	5.421877	
F-statistic	56.84383	Durbin-Watson stat	1.154903	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.535787	Mean dependent var	6.820526	
Sum squared resid	282.3476	Durbin-Watson stat	0.022177	

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9, 2021

Berdasarkan output penelitian persamaan menunjukkan pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota pada Sumatera Barat menggunakan koefisien regresi sebanyak 0.279. Hal ini berarti jika Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi satu % maka Kemiskinan akan semakin tinggi sebesar 0.279 % dengan asumsi *Ceteris Paribus*.

Berdasarkan output penelitian persamaan diatas memberitahukan indeks pembangunan manusia (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota pada Sumatera Barat menggunakan koefisien regresi sebesar -0.307. Hal ini berarti jika indeks pembangunan manusia meningkat satu persen maka jumlah penduduk miskin akan menurun sebesar -0.307 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.

Berdasarkan hasil penelitian persamaan diatas menunjukkan Kebijakan Pemerintah (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota Sumatera Barat dengan koefisien regresi sebesar -0.0013. Hal ini berarti jika Kebijakan

Pemerintah meningkat satu persen maka permintaan kemiskinan akan turun sebesar 0.0013 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.

Dengan nilai koefisien konstanta (C) adalah sebesar 27.23 berarti jika semua variabel bebas yaitu Pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ), Indeks Pembangunan Manusia ( $X_2$ ) dan Kebijakan Pemerintah ( $X_3$ ) naik sebesar satu satuan secara rata-rata maka kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 27.23 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat atau mengetahui kontribusi dari variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Gujarati, (2006) menuturkan bahwa nilai  $R^2$  berkisar antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai  $R^2$  mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan model tersebut dapat dikatakan baik.

Berdasarkan output pengujian yg sudah dilakukan diperoleh nilai R-Squared sebanyak 0.64. Hal ini berarti sebanyak 64%. Kemiskinan bisa dijelaskan pada variabel bebasnya yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kebijakan Pemerintah. Sedangkan sisanya 36% Dijelaskan oleh variabel lain diluar model atau tidak dimasukkan pada penelitian ini.

Berdasarkan data & pengujian teori yang sudah dilakukan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan alpha 0,05. Dengan nilai signifikan 0,0008 dan nilai koefisien regresi 0.279896. Artinya apabila terjadi peningkatan pada Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1%, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 1,35% sehingga hipotesis diterima

Pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini berdampak pada kemiskinan, hal ini berpengaruh ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun. Apabila pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya mengalami peningkatan maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi meningkat, Arsyad (2004), Kebutuhan dan perkembangan ekonomi saling terkait. Sulit bagi otoritas publik untuk membuat posisi baru tanpa perkembangan ekonomi yang tinggi. Demikian pula sulitnya membuka pintu usaha bagi orang miskin (jaringan lingkungan) jika pembangunan ekonomi hanya ditopang oleh latihan penciptaan dan membutuhkan tenaga kerja pendidikan lanjutan. Dimana sebagian besar masyarakat miskin tidak mengikuti pendidikan dasar (SD) atau belum tamat sekolah dasar. Konsekuensi dari penelitian ini adalah sesuai penelitian yang dipimpin oleh Susanty (2013) yang menyatakan bahwa pembangunan keuangan memiliki dampak positif dan besar terhadap kemiskinan.

Berdasarkan data dan pengujian teori yang telah dilakukan dalam penelitian ini, indeks pembangunan manusia memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan alpha 0,05. Dengan nilai 0.0000 dan nilai koefisien regresi 0.307500, hal ini berarti ketika terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 1%, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar -0.30% sehingga hipotesis diterima.

Napitupulu S. (2007), Ia mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia menggunakan indikator kompleks untuk menghitung harapan hidup, tingkat melek huruf, konsumsi per kapita, dan sebagainya. Semakin tinggi kualitas penduduk di wilayah tersebut, semakin sedikit penduduk miskin di wilayah tersebut, karena sektor kesejahteraan dan sekolah serta memperluas pendapatan per kapita menambah pergantian peristiwa manusia.

Berdasarkan data dan pengujian teori yang sudah dilakukan pada penelitian ini, Kebijakan Pemerintah memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap

kemiskinan dengan alpha 5%. Dengan nilai 0.1227 dan koefisien regresi sebesar -0.001307, hal ini berarti bahwa ketika terjadi peningkatan kebijakan pemerintah sebesar 1%, maka kemiskinan akan terjadi penurunan sebesar -01% sehingga hipotesis ditolak.

Dapat di duga Program bantuan social yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat tidak tepat sasaran sehingga tidak efektif menurunkan persentase kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai menggunakan penelitian Anderesta, (2019) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah (bansos) berpengaruh negative & tidak signifikan terhadap kemiskinan.

## **SIMPULAN**

Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil pembahasan output analisis regresi model panel dengan memakai model random effect dan output penelitian antara variabel bebas & variabel terikat. 1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Dengan probabilitas  $0,0008 < \alpha = 0,05$  dan hipotesis yang menyatakan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat diterima. 2) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Dengan Probabilitas  $0.0000 < \alpha = 0,05$  dan hipotesis yang menyatakan bahwa Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat diterima. 3) Kebijakan Pemerintah (BANSOS PIP) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Dengan Probabilitas  $0.1227 \geq \alpha = 0,05$  dan hipotesis yang menyatakan bahwa Kebijakan Pemerintah (BANSOS PIP) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat ditolak.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265–283. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13022>
- Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin. *Unimal Peress*, 01(01), 1689–1699.
- Amaluddin, Payapo, R. W., Laitupa, A. A., & Serang, M. R. (2018). International Journal of Economics and Financial Issues A Modified Human Development Index and Poverty in the Villages of West Seram Regency, Maluku Province, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(2), 325–330.
- Anderesta, K. (2019). *Pengaruh Bantuan Sosial dan Tingkat Inflasi terhadap Kemiskinan Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2007–2017*. 1–124.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Barlinti, Y. S. (2007). Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Esa Unggul*, 4(3), 158–167.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/2592/2547%0A>
- Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: evidence from eastern Indonesia. *Heliyon*, 6(10), e05235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. <http://deptan.go.id>.
- Jonaidi, A. (2012). Bahan mendeley analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. *Kajian*

- Ekonomi*, 1(April), 140–164.
- Komang, N., Jurusan, M., Ekonomi, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2015). *Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014*. 5. <https://media.neliti.com/media/publications/5350-ID-pengaruh-program-indeks-pembangunan-manusia-ipm-terhadap-pengentasan-kemiskinan.pdf>
- Klasen. (2005). *Economic Growth And Poverty Reduction: Measurement and Policy Issues*. OECD Development Centre. Working Paper No.246
- Kuncoro, M. (2004). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan edisi ke empat*. 215.
- Kusriyah, S., & Aulia, D. (2015). Kebijakan Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2011 Di Kabupaten Demak. *Pembaharuan Hukum*, II(13), 312–322. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1369/1053>.
- Kuncoro, Mudrajad 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44–55. <https://doi.org/10.18196/jesp.9.1.1526>
- Management, P. (2016). *Plagiarism Checker X Originality Report. January 2002*, 20050266.
- Meriyanti, N. komang. (2015). Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(1). <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v3i1.12777>
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364>
- Nur, M. (n.d.). *Filsalot , AUama ,*
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manuis Terhadap Pertumbuhan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/download/3158/847>.
- Nurkse, Ragnar. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press 1953.
- OKOROAFOR, M. O. A. N. C. (2013). Poverty and Economic Growth in Nigeria 1990 – 2011. *The MacrotHEME Review*, 2(4), 144–160.
- Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(2), 44. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160>
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>
- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Rasidin K & Bonar. 2004. “Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium.” *DT - Economic and Management*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/40840> (January 18, 2021).
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 236–255. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Simatupang, P. (2003). Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan: Hipotesis “Trickle Down” Dikaji Ulang. *Economics and Finance in Indonesia*, 51(3), 291–324.
- Škare, M., & Družeta, R. P. (2016). Poverty and economic growth: a review. *Technological and*

- Economic Development of Economy*, 22(1), 156–175.  
<https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965>
- Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 9(1), 1.  
<https://doi.org/10.24198/jmi.v9i1.9374>
- Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Semarang; Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- Soegijoko. 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Suyanto dan Hisyam, Djihad. (2000). Refleksi dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Terhadap, S., Di, K., Sulawesi, P., Rarun, C. C. E., Kawung, G. M. V, Niode, A. O., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Rarun, C. C. E. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01), 91–102.
- Tambunan, Tulus. (2011). Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wardis Girsang, PhD. (2011).
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 8, 176–185.
- Yolanda, Y. (2017). Analysis of factors affecting inflation and its impact on human development index and poverty in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20(4), 38–56.  
<https://doi.org/10.35808/ersj/873>
- OKOROAFOR, M. O. A. N. C. (2013). Poverty and Economic Growth in Nigeria 1990 – 2011. *The MacrotHEME Review*, 2(4), 144–160.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217.  
<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>.
- Putra, W. (2019). *Perekonomian Indonesia*. Rajawali Pers,.
- Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: evidence from eastern Indonesia. *Heliyon*, 6(10), e05235.  
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Economic Development 11. *Addison-Wesley, Pearson*, ISBN, 10, 0–13.
- Tambunan, T. TH. (2014). “Perekonomian Indonesia”. Yogyakarta: BPFPE.
- UNDP. 1997. “Human Development Report” United Nations Development Programme. New York